

**Notulen Rapat Koordinasi dan Evaluasi MCP-KPK Tahun 2024 dan 2025
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru**

A. Pendahuluan

- Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025
Pukul : 09.00 Wita s/d 12.00 Wita
Tempat : Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru
Agenda : Rapat Koordinasi dan Evaluasi MCP-KPK Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Pimpinan Rapat : Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Undangan Pembukaan Rakor: 1. Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI – Bpk. Maruli Tua
2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5. Komandan Kodim 1006/ Banjar
6. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru
7. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
8. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru
9. Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
10. Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi Prov.Kalsel
- Peserta Rapat : 1. Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru
2. Para Asisten
3. Inspektur
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah

B. SAMBUTAN DAN ARAHAN :

1. Sambutan dari KPK-RI (Korsup Wilayah III):
 - a. Nilai MCP KPK tidak menjamin daerah bebas dari korupsi, tetapi bentuk komitmen dan upaya pemda dalam pencegahan korupsi di daerah;
 - b. Hasil MCP KPK harus dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.
 - c. Hasil MCP Kota Banjarbaru yang sudah baik ini perlu di jaga oleh Inspektorat selaku pengawas internal, perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
 - d. KPK memiliki alat ukur terhadap outcome melalui SPI, dimana SPI Kota Banjarbaru masih di zona waspada (77,13).
 - e. Kota Banjarbaru bisa mengambil terobosan agar menjadi role model kota antikorupsi di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Sambutan dan arahan Wali Kota Banjarbaru :
 - a. Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan apresiasi kepada Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI dan Para Tamu Undangan yang telah berkenan berhadir pada acara pembukaan hari ini.
 - b. MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
 - c. Pada MCP 2024, telah dirumuskan 8 area intervensi dengan 26 indikator dan 62 sub-indikator. Perubahan ini disesuaikan dengan evaluasi hasil skor MCP, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, dan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023.
 - d. Rata-rata capaian MCP tahun 2024 secara nasional yakni sebesar 76%. Adapun Capaian Pemerintah Kota Banjarbaru yakni sebesar 97,03% dengan peringkat 20 secara nasional dan peringkat 1 se Kalimantan Selatan. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,09% dari hasil tahun 2023. Alhamdulillah, Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mempertahankan selama 2 tahun berturut-turut untuk capaian MCP tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

- e. Capaian dan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, diharapkan memberikan iklim investasi yang sehat sehingga mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya dan berusaha di Kota Banjarbaru sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.

C. PEMBAHASAN RAKOR :

1. Substansi IPKD MCP Tahun 2025, meliputi :
 - a. Aspek transparansi;
 - b. Aspek regulasi dan kebijakan;
 - c. Aspek akuntabilitas;
 - d. Aspek pengendalian risiko.
2. Masing-masing SKPD pemangku area intervensi agar memperhatikan jadwal yang ditetapkan oleh KPK khususnya yang memiliki batas waktu dan melakukan koordinasi serta kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi melalui MCP-KPK 2025.
3. Guna mempermudah koordinasi untuk pemenuhan dokumen MCP Tahun 2025, maka perlu dibentuk fasilitator pada masing-masing SKPD terkait, yang mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi dengan Kepala SKPD terkait pembuatan rencana aksi pencegahan korupsi yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut;
 - b. Menyiapkan dan memverifikasi awal dokumen yang dibutuhkan sesuai pedoman yang telah diterbitkan, sebagai pelaporan capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut, kemudian disampaikan kepada Tim Inspektorat untuk diverifikasi lebih lanjut;
 - c. Berkoordinasi dengan Tim Inspektorat guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan; dan
 - d. Menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada Tim Inspektorat.

D. KESIMPULAN :

1. Nilai MCP KPK tidak menjamin daerah bebas dari korupsi, tetapi bentuk komitmen dan upaya pemda dalam pencegahan korupsi di daerah.
2. Capaian dan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, diharapkan memberikan iklim investasi yang sehat sehingga mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya dan berusaha di Kota Banjarbaru sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
3. Guna mempermudah koordinasi untuk pemenuhan dokumen MCP Tahun 2025, maka perlu dibentuk fasilitator pada masing-masing SKPD terkait.

Banjarbaru, 13 Februari 2025

Notulis rapat,



Iwan Setiawan, S.AP
NIP. 197712241998031004



**PENANDATANGANAN KOMITMEN
BERSAMA UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI MELALUI MCP KPK
TAHUN 2025**



**PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAA
ATAS CAPAIAN MCP KPK TAHUN
2024 KEPADA SKPD TERKAIT DAN
FASILITATOR TERBAIK SKPD**





1Photo2 Rakor MCP
2025.jpg

